



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**

2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,



efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Grobogan, 26 Februari 2024

Kepala Dinas Permukiman dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Grobogan,



Drs. SISWANTO, M.M.
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19640618 199403 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	21
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	32
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	33
MATRIKS RENSTRA	34
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	35
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	36

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

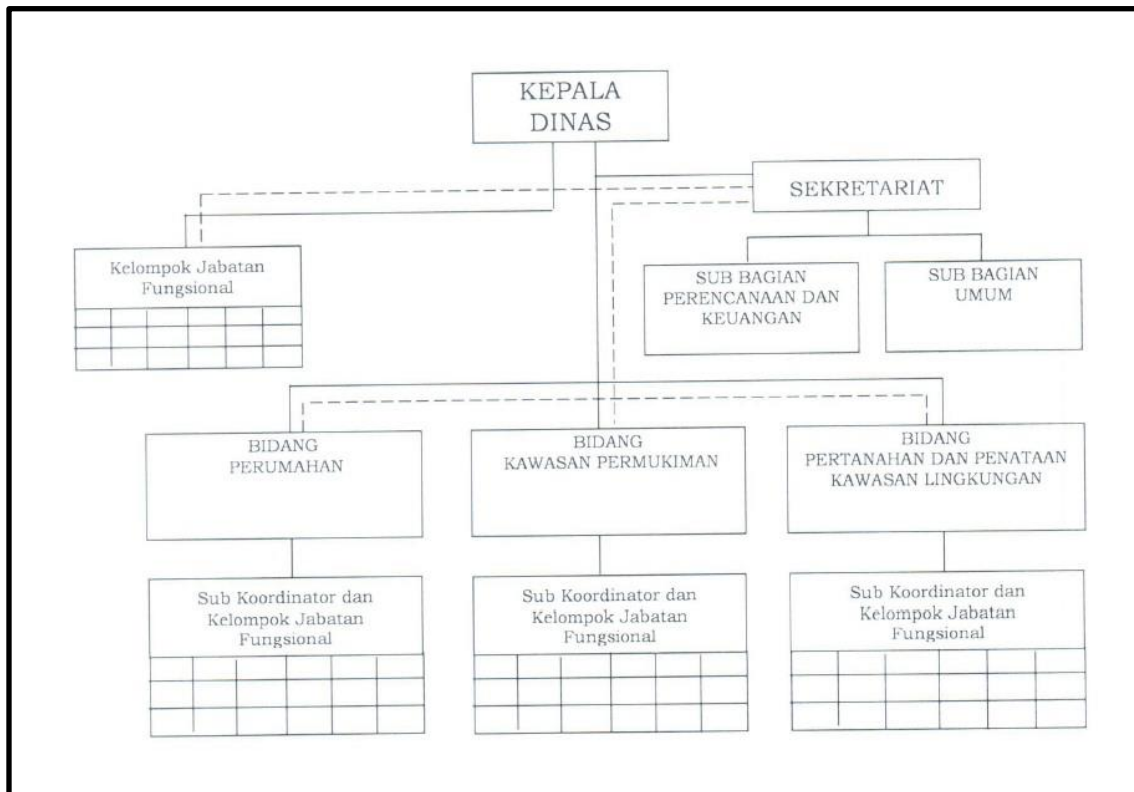


- b. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
 - c. Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Permukiman;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. Sub Koordinator Pemanfaatan Kawasan Permukiman.
5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Pertanahan;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Kawasan Lingkungan;
 - c. Sub Koordinator Pemantauan, Evaluasi Pertanahan dan Kawasan Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026 sebagai berikut :



1. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen perangkat daerah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
3. Terbatasnya anggaran untuk relokasi Rumah Korban Bencana,
4. Masih Banyak nya Masyarakat Grobogan yang masuk ke dalam Kemiskinan Ekstrem.
5. Kurang optimal nya stackholder dalam penanganan permukiman kumuh.
6. Masih Banyak warga di desa yang belum memperoleh Air Bersih dan sanitasi yang baik.
7. Banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan asset tanah ke Pemkab Kabupaten Grobogan.
8. Masih Banyak Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum tersertifikat.
9. Banyak Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum jelas batasnya.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perbaiki RTLH dan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Grobogan
2. Penanganan dan penataan lingkungan di 7 kelurahan Kabupaten Grobogan
3. Penanganan sanitasi, air limbah dan air bersih di Kabupaten Grobogan
4. Penyerahan PSU perumahan oleh pengembang ke Pemkab Grobogan melalui dinas;
5. Pensertifikatan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui dinas.



B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Grobogan No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah :

BABI PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
 Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan
Berbudaya”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : **Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana**

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Misi ke-02, yaitu :

Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021 (%)	Target 2022 (%)	Target 2023 (%)	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Target 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni			75,98	76,38	76,77	77,17	77,57	77,57
			Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni Persentase kawasan kumuh	62,88 0,057	63,16 0,054	63,44 0,050	63,72 0,047	64,00 0,043	64,28 0,040
			Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan jaringan perpipaaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	85,30	86,20	87,10	88,00	88,90	89,80
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	76,56	78,57	78,59	78,60	78,62	78,63
			Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	0	0	23,08	46,15	76,92	100,00

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	1.1.	Presentase rumah layak huni dan kawasan kumuh	%	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100	$\frac{\text{Jumlah unit rumah layak huni}}{\text{jumlah total unit rumah di kabupaten/ kota}} \times 100 \%$	
			Presentase kawasan kumuh	%	Luas kawasan kumuh (SK Bupati) dibagi luas wilayah dikali 100	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh (sesuai SK Bupati)}}{\text{jumlah total luas wilayah}} \times 100 \%$	
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	2.1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	$\frac{\text{Jumlah Komulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga kabupaten}}$	



			melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali 100	
3	3.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di}}{\text{jumlah rumah di rumah Kabupaten}}$



					Kabupaten/ Kota dikali 100		
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan		Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	%	Jumlah unit perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit perumahan kab/kota dikali 100	$\frac{\text{Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan}}{\text{jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengem}}$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	63,72
			Persentase kawasan kumuh	%	0,047
		Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	%	88,00
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestk	%	78,60
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	46,15

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan



karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan				76,77
		Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	63,44
			Persentase kawasan kumuh	%	0,050
		Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	%	87,10
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,59
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	23,08

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023 (%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	87,1	9.326.991.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	72,39	9.896.439.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	5.217.906.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	100	25.000.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	2,42	11.694.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	15.846.239.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;



2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023 (%)
1	2	3	4	5
1.				76,77
	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	63,44
		Persentase kawasan kumuh	%	0,050
	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	%	87,10
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	78,59
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	23,08

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator



kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase rumah layak huni	63,14 %	63,16 %	63,62 %	63,44%	63,73%



2	Persentase kawasan kumuh	0,334 %	0,054 %	0,083 %	0,050%	0,00%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	85,09 %	86,20 %	86,68 %	87,10%	87,93%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,87 %	78,57 %	77,50 %	78,59%	77,76%
5	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	13 %	0 %	13 %	23,08%	52,50%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1		Persentase rumah layak huni	63,14 %	63,16 %	63,62 %	63,44%	63,73%	64,28	memenuhi
2		Persentase kawasan kumuh	0,334 %	0,054 %	0,083 %	0,050%	0,00%	0,040	Tidak memenuhi
3		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	85,09 %	86,20 %	86,68 %	87,10%	87,93%	89,80	memenuhi
4		Persentase jumlah rumah	76,87 %	78,57 %	77,50 %	78,59%	77,76%	78,63	Tidak memenuhi



		tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik							
5		Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	13 %	0 %	13 %	23,08%	52,50%	100,00	memenuhi



B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.223.430.000	18.243.006.100	94,90	100,00
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77	100,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan	32.783.145.000	32.339.538.123	98,65	100,00



No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Kawasan Permukiman				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.217.906.000	5.093.855.202	97,62	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	423.900.000	410.922.875	96,94	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.048.026.000	2.974.294.550	97,58	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.120.000	103.643.500	99,54	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.697.182	853.529.038	98,94	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.500.000	60.996.000	99,18	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.197.000	383.865.140	96,89	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.465.818	306.604.099	95,38	100,00
4	Program Pengembangan Perumahan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00



No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	11.694.000.000	11.655.988.000	99,67	100,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.694.000.000	11.655.988.000	99,67	100,00
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	15.846.239.000	15.564.694.921	98,22	100,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15.846.239.000	15.564.694.921	98,22	100,00



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	52.006.575.000	50.582.544.223	97,26%	2,74 %
A	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman							
	Persentase rumah layak huni	100%	99%	99%	11.694.000.000	11.655.988.000	99,67	0,33 %
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan							
A	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	100%	100%	100%	165.129.000	158.728.871	96,12%	3,88 %
3	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman							



A	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	100%	100%	100%	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77%	6,23%
B	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestk	100%	100%	100%	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91%	3,09%

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan capaian kinerja dan anggaran Tujuan dan Sasaran DISPERAKIM Kabupaten Grobogan dapat dikatakan EFEKTIF dan EFISIEN. Dikatakan efektif karena capaian indikator kinerja rata-rata lebih dari 100% atau dengan kata lain telah melebihi target. Dikatakan efisien karena DISPERAKIM Kab. Grobogan mampu menghemat sumber daya yang ada (waktu, SDM, anggaran).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	100	100%	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77	7,23%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77	7,23%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	100	100%	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91	3,09%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91	3,09%
3	Program Pengembangan Perumahan	100	100	100%	25.000.000	25.000.000	100%	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100%	25.000.000	25.000.000	100%	0%
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	100	100%	11.694.000.000	11.655.988.000	99,67	0,33
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	11.694.000.000	11.655.988.000	99,67	0,33
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100	100	100%	15.846.239.000	15.564.694.921	98,22	1,78
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	100	100%	15.846.239.000	15.564.694.921	98,22	1,78



Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan capaian kinerja dan anggaran Program dan Kegiatan DISPERAKIM Kabupaten Grobogan dapat dikatakan EFEKTIF dan EFISIEN. Dikatakan efektif karena capaian indikator kinerja rata-rata lebih dari 100% atau dengan kata lain telah melebihi target. Dikatakan efisien karena DISPERAKIM Kab. Grobogan mampu menghemat sumber daya yang ada (waktu, SDM, anggaran).

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan “Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)



- Sasaran “Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman” terdiri dari 1 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% untuk indikator “Persentase rumah layak huni”, sebesar 99% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran “Meningkatnya tertib administrasi pertanahan” terdiri dari 1 (satu) dengan indikator “Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan” dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran “Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman dengan indicator “Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan jaringan perpipaaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota” dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi) dan dengan indicator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

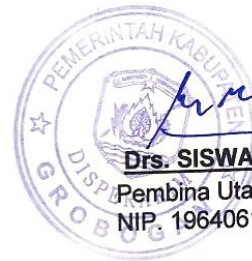
Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 52.006.575.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 50.582.544.233,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,26% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,74%.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan, 26 Februari 2024

Kepala Dinas Perumahan dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Grobogan,



Drs. SISWANTO, M.M.

Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19640618 199403 1 005



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SISWANTO, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M
Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2023



Pihak Kedua,

SRI SUMARNI, S.H, M.M



Pihak Pertama,

Drs. SISWANTO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640618 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63,44%
		Persentase kawasan kumuh	0,05%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	87,10%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	78,59%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	23,080%.
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang	Nilai IKM	79 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Rp8.233.121.000	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp9.800.439.000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.866.592.250	
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp25.000.000	
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp6.500.000.000	

6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp10.608.000.000	
	Jumlah	Rp40.033.152.250	

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI, S.H, M.M

Purwodadi, Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. SISWANTO, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640618 199403 1 005

DATA CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	Penduduk (Jiwa)	JUMLAH KK (Jiwa)	PDAM (Jiwa)	DAK (Jiwa)	Pamsimas (Jiwa)	Lainnya (Jiwa)	Total Layanan Perpipaan (Jiwa)	Air Minum Layak (Perpipaan)	BJP (Dinkes) Terlidungi	BJP Layak (Jiwa)	BJP Tak Terlidungi (Jiwa)	Total BJP (Jiwa)	Akses Air Minum Aman (Jiwa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Brati	51,478	17,879	10,645	1,210	4,595	1,840	18,290	18,290	-	33,416	-	33,416	51,706
2	Gabus	75,316	26,970	2,255	4,120	4,175	500	11,050	11,050	-	64,948	-	64,948	75,998
3	Geyer	60,222	20,074	4,585	1,960	2,580	140	9,265	9,265	-	12,252	-	12,252	21,517
4	Godong	88,781	31,004	4,390	4,820	14,683	2,185	26,078	26,078	-	61,057	-	61,057	87,135
5	Grobogan	79,569	27,347	3,660	2,260	6,644	1,335	13,899	13,899	-	56,692	542	57,234	71,133
6	Gubug	86,448	29,210	1,550	3,000	18,544	2,375	25,469	25,469	-	66,843	-	66,843	92,312
7	Karangrayung	102,991	35,839	745	3,980	12,350	3,485	20,560	20,560	-	63,154	607	63,761	84,321
8	Kedungjati	44,929	15,467		875	3,473	500	4,848	4,848	-	24,544	-	24,544	29,392
9	Klambu	39,287	15,460	675	3,330	4,008	1,620	9,633	9,633	-	24,429	-	24,429	34,062
10	Kradenan	84,589	29,738	5,835	3,785	3,646	-	13,266	13,266	-	73,503	-	73,503	86,769
11	Ngaringan	71,065	25,207	3,215	900	4,700	420	9,235	9,235	-	27,485	-	27,485	36,720
12	Penawangan	66,388	23,440	4,640	1,690	9,357	-	15,687	15,687	-	29,275	-	29,275	44,962
13	Pulokulon	111,957	39,403	8,270	2,170	2,521	395	13,356	13,356	-	68,923	-	68,923	82,279
14	Purwodadi	141,973	49,569	95,095	865	986	-	96,946	96,946	-	84,266	-	84,266	181,212
15	Tanggungharjo	42,698	14,716	5,210	1,050	3,101	-	9,361	9,361	-	28,794	-	28,794	38,155
16	Tawangharjo	58,844	13,199	5,970	2,460	4,196	3,260	15,886	15,886	-	45,638	-	45,638	61,524
17	Tegowanu	58,512	20,230	11,320	920	12,827	1,540	26,607	26,607	-	25,772	-	25,772	52,379
18	Toroh	119,622	42,910	14,310	4,560	6,359	500	25,729	25,729	-	83,315	-	83,315	109,044
19	Wirosari	94,837	33,422	5,625	2,730	9,850	1,215	19,420	19,420	-	40,902	-	40,902	60,322
		1,479,506	511,084	187,995	46,685	128,595	21,310	384,585	384,585	-	915,208	1,149	916,357	1,300,942
	Prosentase		34.54%	12.71%	3.16%	8.69%	1.44%	25.99%	25.99%	0.00%	61.86%	0.08%	61.94%	87.93%

Kabid. Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan

DARLAN ST, MT
NIP 19680514 198903 1 006

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Dr. Sutomo No.10 Purwodadi-Grobogan

Kode Pos :58111, Telepon : 0292-5140756, Faksimile0292-422012, Email : dperakim.grobogan@gmail.com

CAKUPAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	PROGRES JSP	PROGRES JSSP	PROGRES SHARING	PROGRES OD	% PROGRES JSP	% PROGRES JSSP	% PROGRES SHARING	% PROGRES OD
1	BRATI	37	53	17548	13614	1651	2283	0	77,58	9,41	13,01	0
2	GABUS	46	95	22746	11562	10947	237	0	50,83	48,13	1,04	0
3	GEYER	48	94	24089	16359	5299	2431	0	67,91	22,00	10,09	0
4	GODONG	56	93	28962	24568	3028	1366	0	84,83	10,46	4,72	0
5	GROBOGAN	53	61	23651	12623	6153	4875	0	53,37	26,02	20,61	0
6	GUBUG	51	57	23944	20259	2391	1294	0	84,61	9,99	5,40	0
7	KARANGRAYUNG	67	103	34396	20799	8142	5455	0	60,47	23,67	15,86	0
8	KEDUNGJATI	34	58	15072	9406	2363	3303	0	62,41	15,68	21,91	0
9	KLAMBU	28	36	13298	12031	678	589	0	90,47	5,10	4,43	0
10	KRADENAN	46	75	29196	19639	7502	2055	0	67,27	25,70	7,04	0
11	NGARINGAN	38	82	23783	15809	6744	1230	0	66,47	28,36	5,17	0
12	PENAWANGAN	36	77	21224	15975	4691	558	0	75,27	22,10	2,63	0
13	PULOKULON	70	107	40620	26314	8969	5337	0	64,78	22,08	13,14	0
14	PURWODADI	75	86	48529	44510	1703	2316	0	91,72	3,51	4,77	0
15	TANGGUNG HARJO	27	44	12671	10380	927	1364	0	81,92	7,32	10,76	0
16	TAWANG HARJO	32	58	17829	9404	6199	2226	0	52,75	34,77	12,49	0
17	TEGOWANU	33	50	15172	10207	3390	1575	0	67,28	22,34	10,38	0
18	TOROH	70	118	40029	34138	2686	3205	0	85,28	6,71	8,01	0
19	WIROSARI	49	68	31687	27097	2275	2315	0	85,51	7,18	7,31	0
KABUPATEN GROBOGAN		896	1415	484446	354694	85738	44014	0	73,22	17,70	9,09	0
AKSES SANITASI LAYAK KABUPATEN GROBOGAN		77,76										
AKSES SANITASI DASAR KABUPATEN GROBOGAN		22,24										

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan


DARLAN, S.T., M.T.

NIP. 19680514 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi - Grobogan 58111
Telp (0292) 5140756 Fax (0292) 422012

PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017-2023

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Uraian KEGIATAN	Sasaran dan Lokasi	Jumlah Penerima Th.2017	Jumlah Penerima Th.2018	Jumlah Penerima Th.2019	Jumlah Penerima Th.2020	Jumlah Penerima Th.2021	Jumlah Penerima Th.2022	Jumlah Penerima Th.2023	Jumlah	keterangan	Sumber Dana
1	2	3	4	5	5							6	7
1	Bankeupemdes RTLH	Pemugaran RTLH 3 unit per desa untuk seluruh desa di Propinsi Jawa Tengah	Seluruh Desa di Kab Grobogan (2018-2019) Desa zona merah dan kuning (2020)	168 unit	705 unit	819 unit	453 unit	453 unit	503 unit	484 unit	3.585 unit	th 2017 sd 2020' @ Rp 10.000.000,- th 2021-2022 @ Rp. 12 jt th 2023 @ Rp. 20 jt	APBD Propinsi
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas RTLH bagi MBR	37 desa di Kab Grobogan (2019) 26 desa di kab Grobogan (2020)		352 unit	700 unit	758 unit	495 unit	764 unit	80 unit 16 unit 60 unit 29 unit 500 unit	3.754 unit	@ Rp 17.500.000,- tahap 5 tahap 6 tahap 7 tahap 14 & 15 PKE	APBN
3	Dana Alokasi Khusus Bid Perumahan Permukiman	Peningkatan Kualitas RTLH untuk Program Kotaku	Kawasan kumuh perkotaan		177 unit	96 unit	143 unit	63 unit	50 unit		529 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020)	APBN
4	Bantuan Baznas Jateng	Bantuan RTLH Baznas	Desa Program TMMMD Reguler (2017) per Kecamatan 1 Unit	10 unit			19 unit		6 unit	49 unit	84 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020) 20 jt & Ruspini (2022) 15 jt (2023)	Baznas Prov Jateng
5	CSR Bank Jateng CSR PT. Djarum CSR BKK	Program CSR RTLH Bank Jateng Program CSR RTLH PT. Djarum Program CSR RTLH Bank BKK	Desa dengan zona merah 5 desa penerima		75 unit				97 unit	 5 unit 2 unit	179 unit	@ Rp 15.000.000,- @ Rp 15.000.000,-	CSR CSR CSR
6	Pembangunan Baru Disperakim Propinsi Jawa Tengah	Program Pembangunan Rumah Baru	Desa dengan backlog kepemilikan rumah				15 unit				15 unit	@ Rp 35.000.000,-	Disperakim Prop Jateng
7	Program Pengembangan Perumahan	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Pendataan Perumahan Output 1 Bh Siteplan									@ Rp 15.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
8	APBD Kab. Grobogan	Peningkatan Kualitas RTLH	Desa di Kabupaten Grobogan						476 unit	620 unit	1.096 unit	@ Rp 15.000.000,- APBD @ Rp. 25.000.000,- DIF	APBD Kabupaten Grobogan
		JUMLAH		178 unit	1.309 unit	1.615 unit	1.388 unit	1.011 unit	1.896 unit	1.845 unit	9.242 unit		

Purwodadi, 19 Februari 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kab Grobogan



Drs. SISWANTO, M.M.
NIP. 19640618 199403 1 005